



Peningkatan Pemahaman terhadap Peran TNI dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Nusa Tenggara Timur

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: posmahutasoit@gmail.com

Abstract

The implementation of this community service activity is to conduct discussions aimed at increasing understanding of the duties of the TNI to assist local governments in community empowerment programs at the border of Nusa Tenggara Timur (NTT) Province. The method of writing this paper is to use a qualitative approach by reviewing various literature and discussions conducted with Korem 161/Wirasakti Kupang and Kodim 1605 Belu NTT. At the NTT border, the Border Security Task Force (Satgas Pamantas) 742/SWY TNI performs the main task of Border Security and explores the community's potential, and empowers this potential. There are many creations of this unit in "fighting poverty," namely through the five programs of the Wira Yudha House. Rumah Wira Yudha has programs in Education, Health, Love Pancasila, Entrepreneurship, and Wira Yudha Sharing to answer the needs and limitations in border villages. All these activities are full of activities based on Pancasila values.

Keywords: Border Area, Community Empowerment, Nusa Tenggara Timur, TNI Role

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan diskusi yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai tugas TNI membantu pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode penulisan makalah ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur dan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan Korem 161/Wirasakti Kupang dan Kodim 1605 Belu NTT. Di perbatasan NTT, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) 742/SWY TNI, tidak hanya melakukan tugas pokok Pengamanan Perbatasan, tetapi juga menggali potensi masyarakat dan memberdayakan tersebut. Ada banyak kreasi satuan ini dalam "memerangi kemiskinan", yaitu melalui lima Program Rumah Wira Yudha. Rumah Wira Yudha memiliki program dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Cinta Pancasila, Kewirausahaan, dan Wira Yudha Berbagi untuk menjawab kebutuhan dan keterbatasan yang ada di desa perbatasan. Semua kegiatan tersebut sarat dengan kegiatan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Pemberdayaan Masyarakat, Nusa Tenggara Timur, Peran TNI.

A. _ PENGANTAR

Dalam kegiatan selain perang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas membantu Pemerintah daerah. Bersama Pemerintah Daerah, TNI telah bekerjasama dalam mengembangkan berbagai bidang. TNI juga memiliki program yang disebut Bhakti TNI. Bisa diartikan pelibatan TNI sebagai alat negara untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan tanpa mengabaikan keamanan dan kewaspadaan nasional. Salah satu bentuk pengabdian TNI adalah TNI Manunggal Pembangunan Desa (TMMD).

Pengabdian ini merupakan bentuk kepedulian dan peran TNI dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan paling dasar masyarakat. Selain pengabdian TMMD, TNI juga melakukan Manunggal Kesejahteraan Sosial, Manunggal Penghijauan, Manunggal Hutan Pangan, Manunggal Pangan Pokok, Manunggal Pertanian, Manunggal Literasi, Manunggal Transmigrasi, dan Manunggal KB Kesehatan. (Sembiring. 2011)

Anggaran Rumah Tangga Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) tentang Tugas Pokok TNI menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain berperang adalah membantu fungsi Pemerintah Daerah. Tujuan membantu pelayanan Pemerintahan di daerah adalah untuk menunjang terselenggaranya fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi. Untuk itu diperlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, antara lain membantu mengatasi dampak bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, dan mengatasi hambatan akibat pemogokan dan konflik komunal. (UU-RI, 2004)

Fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Salah satu fasilitas yang dimiliki TNI adalah adanya RS TNI yang diperuntukan bagi anggota TNI namun juga dapat digunakan oleh masyarakat lainnya. Jika terjadi bencana di suatu daerah, maka rumah sakit dapat dijadikan sebagai tempat pertolongan korban bencana alam, dan tenaga medis yang ada akan siap membantu. Selain itu, fasilitas lain yang dimiliki TNI dalam hal ini terlihat dari keberadaan Koramil di setiap kecamatan atau pos-pos wilayah yang dibangun TNI. Adapun kegunaan sarana tersebut pada saat terjadi bencana alam atau konflik, tempat tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk menyimpan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, atau penunjang lain yang diperlukan. (Dalini, 2011)

Alat adalah benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal membantu pemerintah daerah, TNI memiliki banyak peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah jika diperlukan. Antara lain truk, pesawat, helikopter, ambulans, kapal laut, dll. Jika terjadi bencana di suatu daerah, maka peralatan yang dimiliki TNI sangat diperlukan. Misalnya, mereka dapat menggunakan truk TNI untuk mengevakuasi warga, pesawat, helikopter, atau kapal untuk mengirim bantuan dan meninggalkan korban di daerah yang sulit dijangkau. Begitu juga dengan ambulans TNI yang bisa digunakan untuk mengevakuasi korban. (Dalini, 2011)

Kemampuan adalah suatu kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh TNI dalam membantu pemerintah daerah. Kemampuan ini menuntut profesionalisme seorang anggota TNI. Seorang anggota TNI tidak hanya dapat mengoperasikan senjata atau di bidang pertahanan, tetapi ia juga memiliki keterampilan lain yang dapat digunakan untuk operasi selain perang. Jika terjadi konflik atau separatis di daerah tersebut, maka dengan segala kemampuan TNI akan berusaha menghentikan konflik tersebut. Kemampuan TNI yang juga dimiliki adalah dari segi kesehatan. Di lingkungan TNI sendiri tersedia tenaga kesehatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI itu sendiri

tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Tak jarang, tim kesehatan dikerahkan di daerah konflik dan bencana. Satu Batalyon, bahkan milik TNI, yaitu Batalyon Zeni Tempur, memiliki kemampuan unik dimana anggotanya dapat membangun jalan, jembatan, perumahan, dan lain-lain. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekuatan TNI dalam mempercepat proses pembangunan daerah. (Dalini, 2011)

Dengan berbagai kemampuan TNI, peran TNI sangat besar di daerah perbatasan yang bersentuhan dengan masyarakat. Maka dari itu, makalah tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mempertemukan unsur TNI di perbatasan untuk bertukar pikiran. Sehingga dapat kita pahami lebih dalam peran nirmiliter TNI dalam pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan khususnya di perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Negara Timor Leste.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Selain menjaga pertahanan/keamanan negara, TNI juga bertugas membantu pemerintah daerah. Dalam pertahanan ekonomi, tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan melakukan wawancara dan focus group discussion. Kami juga melihat berbagai literatur yang mendukung kegiatan ini. Lokasi penelitian adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Perbatasan Kabupaten Perbatasan Napan dan Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara), Perbatasan Motaain (Kabupaten Belu), dan Perbatasan Motamasin (Kabupaten Malaka). Wawancara dilakukan dengan Korem 161 Wirasakti. Pelaksanaannya bisa dilakukan langsung di lokasi karena dilakukan tepat sebelum Pandemi COVID-19.

Sasaran keluaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau permasalahan yaitu menggali peran TNI dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Kegiatan ini didasarkan pada penelitian di daerah perbatasan yang saat ini sedang kami lakukan mengenai peran pertahanan dan keamanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan (Kennedy, 2019).

Pelaksanaan dimulai dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pertemuan evaluasi di akhir. Kegiatan dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah diskusi dan tukar pikiran yang dilakukan bersama Kodam 161 Wirasakti. Narasumber utama yang kami temui adalah Bapak Fransiscus A. Susetio yang telah berpengalaman memimpin Satgas Pamtas 742/SWY TNI di wilayah perbatasan NTT. Ia juga menulis buku tentang pengalamannya dalam

memberdayakan masyarakat di perbatasan darat NTT, yang kami gunakan sebagai sumber sekunder dalam penulisan makalah ini. Kegiatan kedua adalah turun langsung (observasi) ke lapangan dan

berdiskusi dengan TNI di Perbatasan Napan dan Wini, Perbatasan Motaain, dan Perbatasan Motamasin.



Gambar 1. Pertemuan Narasumber Utama dari Korem 161/Wirasakti, Kota Kupang, NTT

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengelolaan Desa Bangunan TNI Manunggal (TMMD) dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim). Setiap tahun setiap Kodim mendapatkan dasar pemikiran untuk melaksanakan kegiatan TMMD untuk membantu pembangunan di daerah. Setiap Koramil diinstruksikan untuk mengusulkan desa mana yang akan dijadikan tempat pelaksanaan sampai mereka memilih satu komunitas. Selanjutnya, rencana TMMD ini didiskusikan dengan pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Pola penyelenggaraan TMMD adalah keterpaduan program lintas sektoral antara TNI, Departemen Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pemerintah daerah, beserta seluruh komponen masyarakat lainnya. Proses perencanaan, pemilihan, dan penentuan sasaran fisik dengan menggunakan pola bottom-up dilanjutkan dengan model top-down, dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dari seluruh elemen terkait mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. tingkat pemerintah daerah.

Selanjutnya Kodim sebagai komando daerah di bawah Korem/Kodam bertindak sebagai unsur pelaksana. Semua jenis kegiatan direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Seperti pembangunan fisik dan non fisik yang dibutuhkan. Dalam program ini, Kodim melibatkan Batalyon setempat dalam membantu pelaksanaan dengan menyiapkan personel yang membantu dalam pembangunan, ditambah instansi pemerintah terkait. (Dalini, 2011)

Pembangunan fisik yang dilakukan TNI merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan fisik dilakukan melalui kegiatan

Desa Membangun TNI Manunggal, meliputi bidang ekonomi dan sosial budaya. Pertumbuhan di sektor ekonomi meliputi pertanian, jasa, dan transportasi. Pengembangan industri pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian diarahkan pada pemberdayaan/peningkatan hasil dari lahan yang ada. Peningkatan hasil pertanian dengan meningkatkan jumlah dilakukan dengan membuka lahan yang tidak terpakai. Peningkatan pelayanan dan transportasi diperlukan karena merupakan sarana utama peningkatan perekonomian masyarakat dan tulang punggung perekonomian daerah masyarakat. Hal ini meningkatkan kegiatan ekonomi, dan beberapa program pembukaan jalan baru telah dilakukan. Pembangunan fisik di bidang sosial budaya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui bidang sosial budaya, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, pembangunan Puskesmas dan Polindes menjadi sasaran utama kegiatan TNI bagi masyarakat di daerah agar derajat kesehatan masyarakat meningkat. Dalam melaksanakan Desa Gedung TNI Manunggal, salah satu prioritas utama adalah bidang pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat akan mampu menggali potensi wilayahnya. (Sembiring, 2011)

Selain pembangunan fisik, pembangunan non fisik juga dilakukan. Acara non-fisik berfokus pada perkembangan manusia sebagai subjek evolusi. Membekali orang dengan keterampilan dan membentuk mentalitas komunitas sangat penting. Sasaran pembangunan non fisik meliputi pertahanan negara dan keterampilan. Seluruh rakyat Indonesia harus memiliki keamanan negara. Generasi muda harus memiliki patriotisme. Oleh karena itu, salah satu sasaran pembangunan non fisik adalah menumbuhkan kesadaran bela negara. Pembangunan non fisik melalui peningkatan keterampilan meliputi pembekalan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Kegiatan pembinaan dan pelatihan di bidang

ekonomi, termasuk pertanian dan kewirausahaan. Kegiatan di bidang sosial budaya antara lain pendidikan, seperti pemberantasan buta huruf, dan kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit. Selain itu, mendorong budaya literasi hukum merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Adanya masyarakat yang berkeadilan diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan mengetahui hukum, orang akan merasa takut untuk melanggar hukum. (Sembiring, 2011)

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini (2019) selama 39 tahun sejak tahun 1980, Desa Bangun TNI Manunggal telah membangun jalan sepanjang 24.391.653 meter. Selain pembuatan parit, irigasi, siring sepanjang 3.572.223 meter, dan jembatan 7.418. Tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rumah telah dibangun atau direhabilitasi. Satu juta dua ratus sembilan ribu dua pipa air bersih telah terpasang, 8.162 sarana peribadatan telah dibangun, 7.786 gedung sekolah telah dibangun, dan jaringan listrik telah terpasang di 15.484 lokasi (Tjahjanto, 2019).

Hasil pembangunan yang telah dilakukan TNI, dari kegiatan fisik antara lain pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, pengaspalan, pengerasan jalan, pembangunan jembatan, pembuatan drainase/drainase, perbaikan siring/parit), pemasangan gorong-gorong, pemasangan bronjong, pembangunan/rehabilitasi rumah, pembangunan sekolah/madrasah, pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah, pembangunan/rehabilitasi posko, pembuatan/rehabilitasi mandi, cuci kakus/WC, pemasangan pompa air, pemberhentian, pembuatan sarana olah raga, pembukaan lahan tidur, penanaman pohon/penghijauan. Kegiatan non fisik

antara lain penyuluhan/perkuliahhan meliputi materi: pertanian, peternakan, vaksinasi unggas dan flu burung, perikanan dan kelautan, perkebunan, koperasi, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kesehatan/keluarga berencana, pendidikan/wajib belajar sembilan tahun. tahun dan 12 tahun, kehutanan/reboisasi, tanah/hukum agraria/wajib pajak, kependudukan/akta kelahiran. Dan kegiatan lainnya seperti pemutaran film/hiburan masyarakat, pengobatan massal gratis, akta kelahiran gratis, pemberian bibit ikan kepada masyarakat, pemberian bantuan pinjaman permodalan, penyelenggaraan pasar murah, olah raga bersama masyarakat, sosialisasi mobil pintar dan perpustakaan, penghijauan dan pembagian bibit penghijauan. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian daerah karena terbukanya keterisolasian antar desa atau daerah terpencil dan meningkatkan keterampilan masyarakat (Dalini, 2011).

Di bidang kesehatan, kerjasama dengan TNI sejalan dengan Inpres tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan nasional penguatan paradigma pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya rehabilitatif kuratif. Melibatkan seluruh komponen bangsa dalam membangun standar kesehatan. Selain itu, kegiatan kerjasama dengan TNI diharapkan dapat dimanfaatkan dan membantu Pemerintah dalam memberdayakan daerah. Serta sinergi dalam meningkatkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa, menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerah terpencil dan masalah kesehatan. (Moeloek, 2017)



Gambar 2. Diskusi dengan Narasumber

Peran TNI dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Perbatasan RI-RDTL, NTT (Susetio, 2014)

TNI menyadari bahwa musuh terbesar saat ini bukanlah perang antar bangsa melainkan kelemahan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan kekuatan sumber daya manusia Indonesia, secara otomatis segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri dapat dengan mudah dicegah. Contoh kasus dalam penelitian ini adalah program dan kegiatan TNI di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste (RI-RDTL) Kodam Udayana melalui Satgas Pamtas. Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat

terdiri dari satuan setingkat Batalyon yang menempati posko-posko yang didirikan di tempat-tempat yang dianggap rawan beserta daerah perbatasan. Wilayah perbatasan RI-RDTL panjangnya 267,8 km. Dibutuhkan sebanyak 40 pos pamtas (Disjarahad, 2012). Karena wilayah perbatasan Indonesia kini telah dianggap sebagai

garis pertahanan terdepan negara, maka pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan perbatasan, pendekatan keamanan, dan pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan saling berdampingan dalam mengembangkan wilayah perbatasan.



Gambar 3. Peta Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Disjarahad, 2012)

Penanganan pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL dipercayakan kepada Satgas Batalyon Pamtas 742/Satya Wira Yudha dengan komando operasi “Perisai Cendana” yang terdiri dari 650 personel. Batalyon ini melihat “Musuh Negara” yang telah lama bercokol di sepanjang perbatasan negara RI-RDTL: kemiskinan, kebodohan, keterbatasan, dan keterbelakangan. Ia membentuk program Rumah Wira Yudha Rumah untuk mengalahkan musuh. Rumah Wira Yudha adalah program komprehensif yang dibuat oleh Satgas Batalyon Pamtas 742/SWY berdasarkan penelitian mereka pada komunitas perbatasan Indonesia-Timor Leste.

dengan UPF (Polisi Timor Leste). Namun, tidak semua warga perbatasan Indonesia-Timor Leste memahami arti dan hukum terkait dengan penanda batas negara. Satgas juga mensosialisasikan patok batas negara yang telah disepakati kepada masyarakat Indonesia di perbatasan RI-RDTL sekaligus memantau daerah-daerah yang masih bermasalah. Satgas ini juga berkoordinasi dengan instansi terkait (Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina). Tentunya untuk mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak dijadikan sebagai basis perlawanan terhadap negara tetangga.

Tugas Satgas Pamtas adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat dan pengembangan wilayah terbatas. Di pundak Batalyon 742/SWY, tugas pokok disematkan: mencegah pelanggaran perbatasan, penyelundupan, dan pasar gelap, menggeser atau kehilangan batas, hingga mengoordinasikan pengamanan perbatasan



Gambar 4. Diskusi di Perbatasan Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT

Tugas yang paling kritis dan menantang adalah melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan

perbatasan darat RI-RDTL. "Musuh" yang paling membingungkan di perbatasan RI-RDTL, di antara

banyak "musuh" lainnya adalah kemiskinan. Kemiskinan hanya bisa dilawan dengan pemberdayaan, bukan dengan diberi makan dengan dana. Pemberdayaan Masyarakat di perbatasan negara merupakan salah satu agenda khusus pembangunan wilayah. Mengikuti instruksi Panglima TNI yang mengingatkan, "TNI harus profesional, militan, solid, dan bersama rakyat, menjadikan TNI yang kuat." Tugas Satgas Pamantas di perbatasan negara tidak mudah. Selain itu, personel Satgas Pamantas 74/SWY harus mengamankan perbatasan RI-RDTL, juga harus berhadapan dengan berbagai karakter masyarakat, dan banyak masalah yang mungkin muncul. Mulai dari penyelundupan berbagai barang ilegal hingga masalah "klasik" kemiskinan dan kebodohan. Satgas Pamantas 742/SWY terbukti mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di daerah. Mereka tidak hanya mengemban tugas pokok Pengamanan Perbatasan tetapi juga menggali potensi masyarakat dan memberdayakan potensi tersebut.

Selain program TMMD, unit ini memiliki banyak kreasi dalam "melawan musuh" yaitu melalui Program Lima Rumah Wira Yudha. "Musuh" terbesar di perbatasan negara RI-RDTL adalah rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan penyakit. Tidak ada "motor penggerak" sebagai inspirasi yang bisa memotivasi mereka untuk maju. Satgas Pamantas 742/SWY melalui Program Lima Rumah Wira Yudha berusaha memerangi musuh-musuh tersebut dengan program yang terukur dan terarah. Rumah Wira Yudha memiliki wadah program yang terdiri dari 5 (lima) jenis kegiatan utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Cinta Pancasila, Kewirausahaan, dan Wira Yudha Berbagi. Setiap bidang dibagi menjadi beberapa bagian kecil untuk menjawab kebutuhan dan keterbatasan yang ada di lapangan. Semua kegiatan tersebut harus sarat dengan acara-acara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.



Gambar 5. Diskusi di Makodim 1605, Kabupaten Belu, Perbatasan NTT

Pendidikan (Susetio, 2014)

Dalam program pendidikan, hal pertama yang harus dilihat adalah kondisi sekolah di suatu wilayah atau wilayah dekat posko. Apa batasannya? Apa sumber pengajarannya, atau apakah ada buku yang tersedia? Satgas Pamantas sejak awal telah menyiapkan prajurit-prajurit terpilih untuk dilatih sebagai tenaga pengajar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram dan SDN 19 Gebang Mataram. Di perbatasan RI-RDTL, fokus pertama di bidang pendidikan adalah "Percepatan Belajar Membaca Siswa" di sekolah perbatasan.

Berdasarkan data, tingginya angka buta huruf nasional didominasi di wilayah NTT. Misalnya, siswa kelas V di wilayah Mahen dan siswa kelas VI SD Sunsea di wilayah Pos Nelu tidak bisa membaca. Data awal dari siswa yang tidak bisa membaca dimasukkan dalam "Program Akselerasi Membaca". Prestasi anak kelas satu baru bisa menghafal abjad, dan siswa kelas dua bisa menyusun suku kata. Siswa kelas satu dapat

menyusun suku kata pada bulan berikutnya, dan siswa kelas dua sudah lancar membaca. Juga dibuat "tempat taman baca" yang berisi buku pelajaran dan perlengkapan sekolah dari keluarga besar Korem 162/WB, sumbangan buku dari siswa SD di NTB, dan 19 buku perpustakaan dari Toko Buku Gramedia Kupang. Taman baca juga dibuat di posko.

Program pendidikan lainnya adalah melaksanakan kegiatan "Prajurit Masuk Sekolah". TNI yang dilatih belajar menjadi guru di sekolah. Sekolah telah menetapkan jadwal dan bahan ajar. Selain itu, anggota TNI juga melatih guru keterampilan komputer, seperti di desa Asumanu dan Baen. "Kursus" gratis, dua kali seminggu, di rumah Kepala Sekolah. Hasilnya 4 dari 18 guru di SD Asumanu dan Baen sudah mengoperasikan komputer dengan lancar. Selain itu, enam ribu buku bingkisan juga disiapkan untuk memotivasi siswa berprestasi. Perusahaan air mineral PT menyumbangkan buku-buku tersebut. JeTe Junior Atambua dan para donatur lainnya. (Susetio, 2014)

Bidang Kesehatan (Susetio, 2014)

Satgas Pamtas menyelenggarakan pengobatan gratis dua kali sebulan di bidang kesehatan. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan obat. Namun banyak bantuan dari berbagai pihak, termasuk teman-teman Jakarta, dan dukungan dari pihak lain. Dalam kegiatan pengobatan massal gratis bagi masyarakat, Satgas Pamtas telah bekerjasama dengan baik dengan tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) dari Dinas Kesehatan, Komisi Pencegahan HIV, dan PMI di Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara. Setiap pengobatan massal juga diatur dengan kegiatan sikat gigi massal untuk anak sekolah, pendidikan kesehatan dari KPA, dan kegiatan Palang Merah Indonesia. (Susetio, 2014)

Program Cinta Pancasila (Susetio, 2014)

Program Cinta Pancasila bermaksud untuk membangun kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ideologi Pancasila. Misalnya, kami menonton film nasional yang bergiliran di pos terdepan. Menyiapkan 7 LCD untuk mendukung kegiatan. Ada juga penyuluhan tentang Pancasila di Pos Satgas binaan sekolah yang dilengkapi dengan permainan interaktif Pancasila. Untuk penanaman nilai-nilai Pancasila, kegiatan kepramukaan. Dilaksanakan di beberapa posko, antara lain Gugus Depan yang membentuk Satgas Pamtas di SMP St. Daniel di Oepoli, Kabupaten Kupang. Anggotanya terdiri dari 68 siswa dan 88 siswa. Tidak kalah pentingnya menanamkan nilai-nilai fundamental dari ajaran karakter, seperti mengajarkan etika dan budi pekerti. Kita bangsa Indonesia yang harus selalu ingat bahwa tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai melalui perjuangan beratus-ratus tahun. Kemerdekaan kita bukanlah pemberian dari bangsa asing! Maka kita semua harus mensyukuri kemerdekaan dengan memperingati Proklamasi Republik Indonesia. Program tersebut, misalnya, berjalan kaki sepanjang 157 km bersama masyarakat, siswa, siswa sekolah, dan anggota pos di seluruh perusahaan. Ini semacam pendakian estafet. Kegiatan ini juga diselingi dengan serja bakti kecil, kontes, pembagian pakaian yang sesuai, dan menonton film bersama. Ada juga permainan Pancasila interaktif berhadiah susu. (Susetio, 2014)

Bidang Kewirausahaan (Susetio, 2014)

Masyarakat juga tumbuh subur sebagai petani di bawah binaan Satgas Pamtas Batalyon 742/SWY. Di bidang Kewirausahaan, telah disiapkan tim prajurit terlatih tentang cara menanam berbagai tanaman bernilai ekonomi. Bibit tersebut berasal

dari bantuan masyarakat dan dinas terkait. Penugasan tersebut juga menerima biji sawi, bayam, kangkung, kacang panjang, tomat, kopi, dan kemiri dari Badan Litbang Pertanian Provinsi NTT. Setelah itu, kemungkinan lokasi yang cocok untuk menanam benih. Mereka dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten dalam peminjaman traktor dan traktor tangan untuk membuka lahan masyarakat seluas lebih dari 59,5 Ha. Misalnya, dua kelompok tani dan kelompok perikanan yang baru terbentuk di Motaain, yakni Fatubesi dan Manusasi. Harapannya adalah tercapainya ketahanan pangan di tepi perbatasan negara sekaligus menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan. Bahkan menjadi kebanggaan jika hasil bumi di daerah perbatasan bisa menjadi andalan pasokan sayuran di pasar Atambua. Ada program lain di bidang kewirausahaan. Yakni membina “pengrajin makanan tempe” di Inbate dan Salore, membuat Martabak Terang Bulan di Fatuha dan Silawan, dan pengrajin di Silawan, Haslot, Nino, Delomil, dan Mako Satgas sendiri. (Susetio, 2014)

Wira Yudha Berbagi (Susetio, 2014)

Wira Yudha Berbagi memiliki dua arti berbagi: berbagi benda atau materi dan berbagi tenaga dan pikiran dan berbagi dalam konteks materi, misalnya memberi bibit, buku pelajaran, dan pakaian layak pakai. Pada saat yang sama, kami berbagi dalam rangka tenaga dan pikiran antara lain dalam bentuk kunjungan dan bakti sosial ke panti asuhan dan lansia dengan gereja dan suster setempat, sambungan pipa di Haumeniana, hingga pembangunan Souvenir Corner di Motaain. Pencapaian program-program yang ditargetkan di bawah kemampuan yang dimiliki dengan tidak mengukur ukuran dan besarnya hasil karena hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Untuk mendukung hal tersebut, Program Wira Yudha Rumah diarahkan, terukur, berkelanjutan, dan bersinergi. Diarahkan adalah program yang sejalan dengan tugas pokok Satgas Pamtas, seperti yang saya jelaskan di atas. Terukur artinya dapat mengukur hasil dari segi kualitas dan kuantitas. Hasil tersebut dapat dilihat dari laporan-laporan dan bukti-bukti tertulis yang kami susun secara berkala dan fakta-fakta di lapangan. Pada saat yang sama, kontinuitas berarti Gugus Tugas berikutnya juga menjalankan program. Ada batasan rumusan Standar Sinergi, sehingga harus menjalankan aplikasi secara sinergi dengan pihak lain misalnya dengan mendorong diterbitkannya SK Kelompok Tani Desa Silawan juga SK Gugus Depan Pramuka hasil formasi SMP St. Daniel di Oepoli. Satgas Infanteri Pamtas 742/SWY patut diapresiasi. Pencatatan prestasi yang mereka capai antara lain melalui angket kepuasan masyarakat terhadap berbagai kegiatan Rumah Wira Yudha. (Susetio, 2014)



Gambar 6. Foto di Pos Perbatasan (PLBN), Perbatasan NTT

D. PENUTUP

UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain perang adalah membantu fungsi Pemerintahan Daerah. Bersama Pemerintah Daerah, TNI telah bekerjasama dalam mengembangkan berbagai bidang. TNI juga memiliki program Dinas TNI, yang dapat diartikan sebagai pelibatan TNI sebagai alat negara untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan tanpa mengabaikan keamanan dan kewaspadaan nasional. Salah satu Program Bhakti adalah Desa Gedung TNI Manunggal merupakan program terpadu antara TNI dengan Pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Satgas Pamantas Batalyon 742/SWY, yang bertugas di perbatasan Indonesia-Timor Leste, melihat "Musuh Negara" terutama sebagai kemiskinan,

kebodohan, keterbatasan, dan keterbelakangan. Untuk mengalahkan musuh, dibentuk program Rumah Rumah Wira Yudha. Rumah Wira Yudha memiliki wadah program yang terdiri dari lima kegiatan besar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Cinta Pancasila, Kewirausahaan, dan Wira Yudha Berbagi. Satgas Yonif 742/SWY Pamantas menjadi "driving force" sebagai inspirator yang memotivasi mereka untuk maju melawan musuh dengan program yang terukur dan terarah.

Ia dapat melaksanakan pengabdian masyarakat ini dengan baik. Penulis dan tim mendapat sambutan yang bersahabat dari rekanan Korem 161/Wirasakti Kupang dan Makodim 1605 Belu, NTT. Diskusi dan tukar pikiran mengenai peran TNI dalam membantu peningkatan produktivitas masyarakat di Kawasan Perbatasan NTT berlangsung secara bersahabat dengan saling bertukar informasi. Rekomendasi dari kegiatan ini bagi para pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun Pemerintah, tetap harus menjaga kearifan lokal dalam memberdayakan masyarakat di perbatasan.



Gambar 7. Peran TNI dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan (Susetio, 2014)

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada Program Simlitabmas dari Pemerintah. Penulis juga mengucapkan terima

kasih kepada Korem 161/Wirasakti Kupang dan pihak lain yang telah membantu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dalini, Mala. (2011) *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pembangunan Daerah (Studi Kasus Tni Manunggal Membangun Desa Ke-84 Desa Tanjung Baringin–Sigading Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas)* , Medan, Mei 2011, dari: <https://id.123dok.com/document/nq7w12kz-peran-tentara-nasional-indonesia-dalam-pembangunan-daerah-studi-kasus-tni-manunggal-membangun-des-ke-84-des-tanjung-baringin-sigading-kecamatan-huristak-kabupaten-padang-lawas.html>. Diakses pada 25/03/2022.
- Dijarahad. (2012) *Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI* , Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat, dari: https://www.tniad.mil.id/images/pdf_buku/buku-peranan-tni-ad.pdf. Diakses pada 26/03/2022.
- Kennedy PSJ, Meko AUI, Tobing SJL, Toruan RL (2019) Ekonomi Pertahanan: Peran Esensial TNI Membantu Desa Perbatasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Masyarakat, Studi Kasus di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur. *Prosiding 3rd International Conference on Rural Development and Community Empowerment* , ENDINAMOSIS 2-3 November 2019, Center for Rural Area Empowerment – ITB, Bandung, Indonesia.
- Moeloek NF (2017) ' *Kementerian Kesehatan dan TMMD Semangat Sehatkan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* ', Jakarta, 16 Mei 2017, dari: <http://www.depkes.go.id/article/view/17051700002/kementerian-kesehatan-dan-tmmd-semangat-sehatkan-masyarakat.html>. Diakses pada 28/03/2022.
- Sembiring, Zulkifer. (2011) ' *Optimalisasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dalam Rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah* ', Bandung 2011, dari: <https://tniad.mil.id/images/pdf/optimalisasi.pdf>. Diakses pada 27/03/2022.
- Susetio FA (2014) *Prajurit Wira Yudha: Kalahkan "Musuh" di Perbatasan Atambua* . Atambua: Yonif 742/SWF.
- Tjahjanto, Hadi. (2019) ' *39 Tahun TMMD, TNI Bangun 24,3 Juta Meter Jalan di Indonesia* ', 8 Agustus 2019, dari: <https://m.merdeka.com/peristiwa/39-tahun-tmmd-tni-bangun-243-juta-meter-jalan-di-indonesia.html>. Diakses pada 25/03/2022.
- UU RI. (2004) Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.